



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP) TAHUN 2021



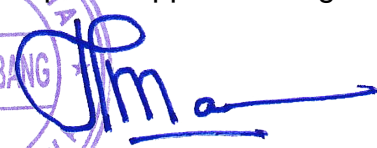
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KOTA PALANGKA RAYA**


## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas karena atas perkenan-Nya telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2021. Pembuatan LKIP merupakan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023. Laporan LKIP ini memuat pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya sebagai bentuk peran serta aktif dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2021, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas dan semakin memacu kinerja di masa yang akan datang, selanjutnya diharapkan sebagai acuan penyempurnaan laporan kinerja pada tahun berikutnya.

Palangka Raya, Januari 2022  
Kepala Bappedalitbang Kota Palangka Raya,  
  
**Ir. HARRY MAIHADI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630504 199303 1 020



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya selama Tahun 2021, Capaian Kinerja Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi

Pada Tahun Anggaran 2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya dialokasikan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 14.701.208.599 dengan realisasi Rp. 13.165.775.103 yang dijabarkan ke dalam 4 Program dan 15 Kegiatan.

Dalam melaksanakan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2018- 2023, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Perencanaan Daerah dengan 2 indikator yaitu:

1. Indeks Kualitas Perencanaan realisasi sebesar 100%.
2. Persentase OPD yang memiliki perencanaan baik realisasi sebesar 100%

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap sasaran strategis dan indikator, pencapaian sasaran kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung menunjukkan hasil yang memuaskan dengan nilai sebesar 100% dan nilai realisasi anggaran sebesar 89,56%.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3. Isu Strategis .....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	9
<b>Bab II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>10</b>
2.1. Perencanaan Strategis.....	11
2.2. Indikator Kinerja Utama .....	12
2.3. Perjanjian Kinerja .....	14
2.4. Rencana Aksi .....	16
<b>Bab III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>23</b>
3.1. Capaian Kinerja Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2021 .....	23
3.1.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini .....	24
3.1.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir ....	24
3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Bappedalitbang Kota Palangka Raya .....	26
3.1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada) .....	27
3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan .....	27
3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	28
3.1.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	30
3.2. Realisasi Anggaran .....	39
<b>Bab IV PENUTUP .....</b>	<b>51</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya. Perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem pemerintahan yang berfokus pada peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang diimplementasikan oleh masing-masing instansi pemerintah, hal ini berarti instansi pemerintah merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah Kota Palangka Raya yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik mulai tahap perencanaan daerah, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi. Indikator keluaran (*output*) yang dihasilkan adalah berupa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun melalui rangkaian proses perencanaan sesuai dengan kebutuhan publik, kemampuan daerah serta pemberdayaan dan pengembangan potensi daerah serta dokumen sektor lainnya seperti ekonomi, sosial, infrastruktur dan sebagainya.

Penyusunan LKIP Tahun 2021 disusun sebagai pertanggungjawaban atas rencana kerja tingkat Perangkat Daerah Tahun 2021 yang didanai dari APBD yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra tahun berkenaan, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas berhasil tidaknya pencapaian target kinerja sehingga LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2021 ini dapat menjadi acuan bagi pencapaian target kinerja di tahun berikutnya.

## 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan adalah unsur perencana penyelenggaran pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya menjalankan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dengan tugas pokok penyusunan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah tugas lingkup perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya, pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan kerjasama pembangunan daerah dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan badan.

Sesuai Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kota Palangka Raya disebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya ditetapkan dengan Tipe A yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah secara terpadu bersama instansi terkait sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bappeda Kota Palangka Raya dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan perencanaan dan penyusunan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

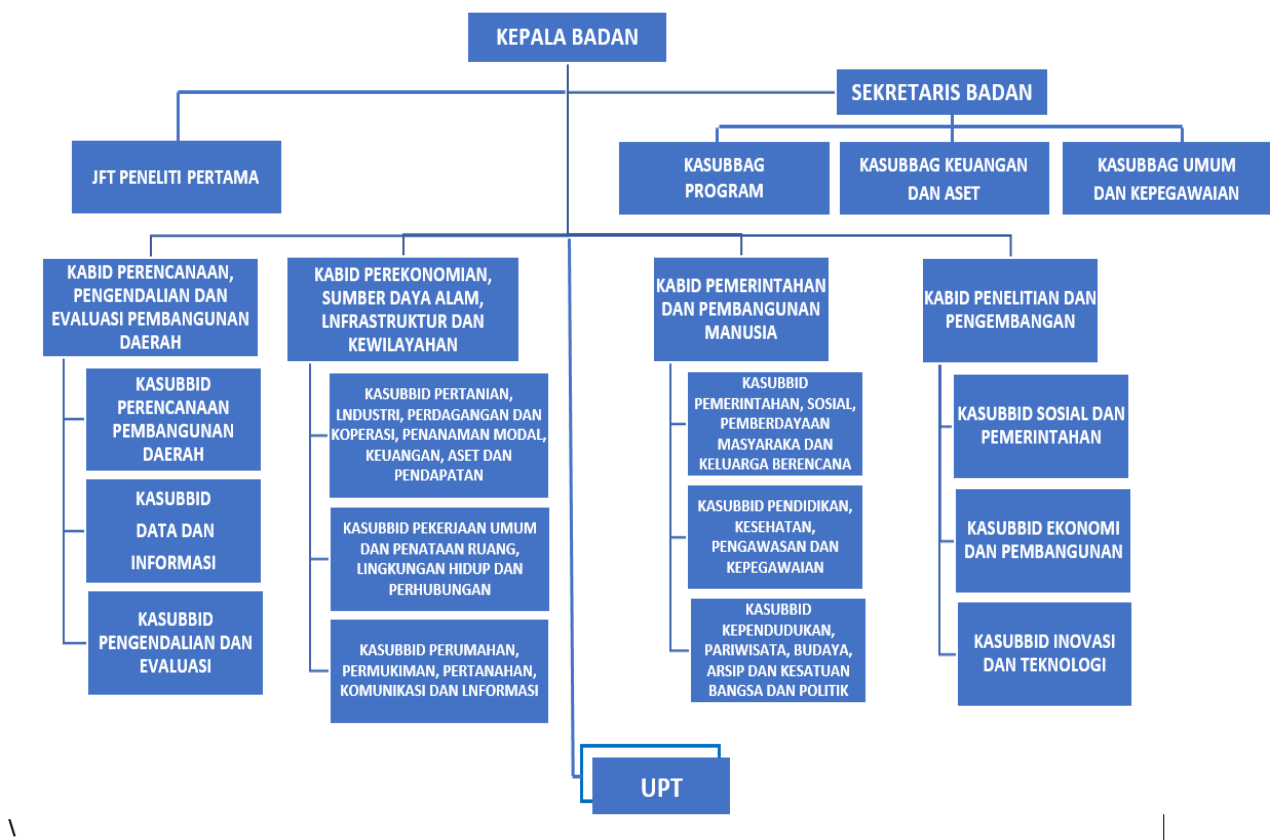
2. Menyelenggarakan, mengatur dan mengarahkan kegiatan sekretaris dan para kepala bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya dalam sinkronisasi pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan membina kegiatan administrasi, organisasi dan tatalaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya sesuai petunjuk dan ketentuan agar mencapai hasil yang optimal;
3. Menetapkan dan mengevaluasi perkembangan penyelenggaraan Program dan kegiatan untuk menentukan skala prioritas program dan kegiatan tahunan serta melaksanakan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Sumber Dana lainnya, serta melaksanakan monitoring, analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan pedoman dan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Menyelenggarakan, memfasilitasi, mengoordinasikan pengkajian dan perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWK) serta mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) tahunan/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
6. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan meneliti surat-surat masuk/keluar, nota dinas, nota pertimbangan, serta arah disposisi yang baik kepada pimpinan maupun bawahan sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
7. Menetapkan penilaian Prestasi Kerja Bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
8. Menetapkan laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya sebagai bahan bagi pimpinan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

## **Struktur Organisasi**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya dibagi dalam 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang pelayanan teknis dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat yang membawahkan :
  - a. Sub Bagian Program
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang membawahkan :
  - a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
  - b. Sub Bidang Data dan Informasi
  - c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
4. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan, yang membawahkan :
  - a. Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi, Penanaman Modal, Keuangan, Aset dan Pendapatan;
  - b. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Perhubungan; dan
  - c. Sub Bidang Perumahan, Permukiman, Pertanahan, Komunikasi dan Informasi.
5. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Pemerintahan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
  - b. Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pengawasan dan Kepegawaian;
  - c. Sub Bidang Kependudukan, Pariwisata, Budaya, Arsip dan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang membawahkan :
  - a. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan
  - b. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan
  - c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2021



Kondisi Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya sampai dengan 31 Desember 2021 berjumlah 49 orang.

- Jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan terakhir adalah sebagai berikut :
  - Pendidikan S-3 sebanyak 2 (satu) orang
  - Pendidikan S-2 sebanyak 11 (sebelas) orang
  - Pendidikan S-1 sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang
  - Pendidikan D-III sebanyak 3 (tiga) orang
  - Pendidikan SLTA sebanyak 2 (dua) orang
- Jumlah pegawai berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut :
  - Struktural
    - Eselon II.b : 1 orang
    - Eselon III.a : 1 orang
    - Eselon III.b : 4 orang
    - Eselon IV.a : 15 orang
  - Pelaksana : 27 orang



- c. Pejabat Fungsional : 1 orang
- 3. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan adalah sebagai berikut : a.
  - Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang
  - b. Pembina Tingkat I (IV/b) : 2 orang
  - c. Pembina (IV/a) : 6 orang
  - d. Penata Tingkat I (III/d) : 13 orang
  - e. Penata (III/c) : 10 orang
  - f. Penata Muda Tingkat I (III/b) : 3 orang
  - g. Penata Muda (III/a) : 12 orang
  - h. Pengatur Tingkat I (II/d) : 1 orang
  - i. Pengatur (II/c) : 1 orang

### Kondisi Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya memiliki sarana prasarana yaitu :

- 1. Gedung Kantor : 1 unit
- 2. Mobil Dinas : 1 unit
- 3. Motor Dinas : 3 unit
- 4. Komputer PC : 52 unit
- 5. Lap Top : 32 unit
- 6. Note Book : 72 unit
- 7. Printer : 57 unit
- 8. Scanner : 4 unit
- 9. Harddisk Eksternal : 60 unit
- 10. Mesik Ketik : 13 unit
- 11. Lemari Besi : 9 unit
- 12. Filling Besi : 57 unit
- 13. Lemari Kaca : 15 unit
- 14. Lemari Kayu : 6 unit
- 15. Rak Kayu : 17 unit
- 16. Meja Rapat : 31 unit
- 17. Meja Tulis : 66 unit
- 18. Meja Biro : 19 unit
- 19. Kursi Rapat : 170unit
- 20. Kursi Tangan : 53 unit
- 21. Kursi Biasa : 21 unit

22. AC	: 75 unit
23. Televisi	: 15 unit
24. Loudspeaker	: 9 unit
25. Unit Power Supply	: 14 unit

### 1.3. Permasalahan Utama/Isu strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan yang berkualitas dan aspiratif menjadi isu strategis dan menjadi prioritas saat ini dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mengimplikasikan RTRWK dan KLHS Kota Palangka Raya dalam perumusan program dan kegiatan sangat penting adanya sinergitas dan keselarasan program pembangunan dalam RPJMD dan RKPD melalui musrenbang, RTRWK dan KLHS Kota Palangka Raya.

Terkait isu strategis di atas, Bappedalitbang Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah mengoptimalkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku perencanaan pembangunan daerah serta didukung ketersediaan data dan informasi yang aktual. Dalam mewujudkan target sasaran yang tertuang dalam Renstra Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 yaitu Meningkatnya kualitas perencanaan daerah yang tersusun dalam program dan kegiatan serta rencana aksi Tahun 2021.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan secara ringkas latar belakang, struktur organisasi serta isu strategis.

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menguraikan secara ringkas perencanaan dan penetapan kinerja serta target anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2021.

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja serta realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

##### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kota Palangka Raya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya yaitu melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya mempunyai fungsi yaitu:

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, penelitian dan pengembangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1. Perencanaan Strategis**

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun

sebagai konsekuensi dari adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan disertai indikator kinerja dan tingkat capaiannya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan target capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi meliputi Kebijakan dan Program yang realistis untuk Tahun 2018-2023.

#### A. Visi

Visi Bappedalitbang sesuai dengan Visi Kepala Daerah yang terpilih periode RPJMD Tahun 2018-2023

**“Terwujudnya Kota Palangka Raya Yang Maju, Rukun dan Sejahtera Untuk Semua”**

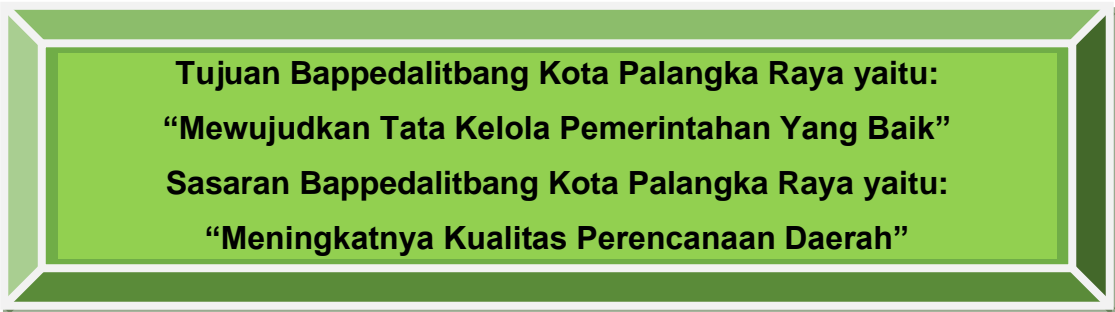
#### B. Misi

Upaya mewujudkan visi tersebut, perlu dirumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatannya untuk memberikan pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah.

**“Mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas)”**



**C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**



**D. Strategi dan Arah Kebijakan**

Dalam mewujudkan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya strategi yang ditempuh adalah:



Didukung dengan 3 program prioritas dan 1 program penunjang yaitu:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Arah kebijakan Tahun 2021 sesuai arah kebijakan pembangunan Kota Palangka Raya merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran yaitu:



2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Instansi Pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya telah menetapkan SK IKU Nomor 14/Set/Bapplitbang/I/2021 Tanggal 5 Januari 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Indikator Kinerja Utama Bappedalitbang Kota Palangka Raya

Sasaran	IKU	Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	PD + PP + PI + PE / 4 Keterangan : PD = % Kelengkapan Data sesuai SIPD PP = % Konsistensi RPJMD-RKPD-Renstra PI = % Pelaksanaan RKPD-APBD Ketepatan Pelaksanaan Implementasi PE = % Capaian Evaluasi	Bappedalitbang	Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023
	Persentase OPD yang memiliki perencanaan baik	1. Jumlah kegiatan dalam renja PD / Jumlah kegiatan dalam renstra PD x 100% 2. Total persentase penilaian PD / Jumlah PD		

2.3. Perjanjian Kinerja

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, disusunlah perjanjian kinerja yang merupakan sebuah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan target mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program

atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan (IKP)	82%
		Persentase OPD yang memiliki perencanaan baik	85%

No.	Program	Anggaran
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.016.869.544
2.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 3.303.422.004
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 3.333.685.201
4.	Penelitian dan Pengembangan	Rp. 565.589.250
<b>Total Anggaran</b>		<b>Rp. 17.219.565.999</b>

**Tabel 2.3**

**Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan (IKP)	82%
		Persentase OPD yang memiliki perencanaan baik	85%

No.	Program	Anggaran
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.669.978.485
2.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 2.295.188.415
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 2.678.456.386
4.	Penelitian dan Pengembangan	Rp. 1.057.585.313
<b>Total Anggaran</b>		<b>Rp. 14.701.208.599</b>

## 2.4. Rencana Aksi

Rencana Aksi untuk mencapai target yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya membuat Rencana Aksi dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Output Kegiatan	Target	Target Realisasi (%)				Penanggung Jawab
											I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13
1	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	%	82	Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah	3.303.422.004									Untung Sutrisno, S.Sos., M.A.P
							1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.763.407.627	Tersedianya perencanaan dan pendanaan	8 Dokumen	20	40	85	100	
		Persentase OPD yang Memiliki Perencanaan yang Baik	%	85			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	622.831.688	Jumlah laporan sinkronisasi program pusat dan daerah	1 Dokumen	20	40	85	100	
							Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen	306.331.563	Jumlah laporan sinkronisasi program pusat dan daerah	1 Dokumen	20	40	85	100	
							Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan	834.244.376	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	6 Dokumen	20	40	85	100	
							2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	830.592.438	Tersedianya analisis data dan informasi	4 Laporan	20	40	85	100	Untung Sutrisno, S.Sos., M.A.P
							Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	535.483.500	Jumlah data dan informasi yang diinput dalam aplikasi e-database dan SIPD dan informasi pembangunan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan	3 Laporan	20	40	85	100	
							Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	295.108.938	Jumlah program yang tersedia di aplikasi perencanaan	1 Laporan	20	40	85	100	
							3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	709.421.939	Tersedianya dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan	11 Laporan	20	40	85	100	Untung Sutrisno, S.Sos., M.A.P
							Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	300.864.001	Jumlah dokumen hasil pencermatan perencanaan dan penganggaran dan jumlah laporan hasil monitoring program dan kegiatan perangkat daerah	3 Laporan	20	40	85	100	



							Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	408.557.938	Jumlah data yang diinput dalam aplikasi e-monev dan jumlah laporan penyusunan capaian pembangunan daerah	8 Laporan	20	40	85	100	
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah	3.333.685.201									
						1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.065.978.500	Dokumen koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	2 Laporan	20	40	85	100	Frans Sunyoto, S.STP., M.Si
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	779.944.125	Laporan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang kesejahteraan masyarakat	1 Laporan	20	40	85	100	
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	286.034.375	Laporan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang kesejahteraan masyarakat	1 Laporan	20	40	85	100	
						2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	588.708.063	Dokumen koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	13 Dokumen	20	40	85	100	Dody Irawan R., S.T.
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	109.332.250	Dokumen koordinasi penyusunan perencanaan bidang perekonomian	5 Dokumen	20	40	85	100	
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	294.376.000	Dokumen asistensi penyusunan perencanaan bidang perekonomian	5 Dokumen	20	40	85	100	
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	50.000.000	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian	5 Dokumen	20	40	85	100	
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	44.999.813	Dokumen koordinasi penyusunan perencanaan bidang sumber daya alam	1 Dokumen	20	40	85	100	
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	70.000.000	Dokumen asistensi penyusunan perencanaan bidang SDA	1 Dokumen	20	40	85	100	

				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	20.000.000	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang SDA	1 Dokumen	20	40	85	100	
				3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.678.998.638	Dokumen koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	15 Dokumen	20	40	85	100	Dody Irawan R., S.T.
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	120.673.750	Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang keciptakaryaan dan kewilayahan	2 Dokumen	20	40	85	100	
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	538.590.250	Dokumen asistensi penyusunan perencanaan bidang keciptakaryaan dan kewilayahan	2 Dokumen	20	40	85	100	
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	23.020.000	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang keciptakaryaan dan kewilayahan	2 Dokumen	20	40	85	100	
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	109.999.000	Dokumen koordinasi penyusunan perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup, bidang kebinamargaan dan perhubungan	3 Dokumen	20	40	85	100	
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	862.965.950	Dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup, bidang kebinamargaan dan perhubungan	3 Dokumen	20	40	85	100	
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	23.749.688	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup, bidang kebinamargaan dan perhubungan	3 Dokumen	20	40	85	100	



[illegible]



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1. Capaian Kinerja Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2021**

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya dengan kinerja yang diharapkan. Hasil pengukuran pencapaian kinerja kemudian dikategorikan ke dalam empat kategori sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Kategori Capaian Kinerja**

Urutan	Rentang Capaian	Kategori	Kriteria
I	Lebih dari 85%	Berhasil (Sangat Baik)	A
II	70% sampai 85%	Berhasil ( Baik )	B
III	50% sampai 70%	Cukup	C
IV	Kurang dari 50%	Kurang	D

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

**3.1.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Rumusan sasaran yang ditetapkan dan dianalisis capaian kinerja antara target kinerja dan capaian kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya terdapat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2021**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2020		Capaian Kinerja	Ket.
			Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan (IKP)	82%	82%	100%	Tercapai
		Persentase OPD yang memiliki perencanaan baik	85%	85%	100%	Tercapai

Untuk mendapatkan Indeks Kualitas Perencanaan diperoleh dari Persentase Kelengkapan Data sesuai SIPD + Persentase Konsistensi RPJMD-RKPD-Renstra + Persentase Pelaksanaan RKPD-APBD Ketepatan Pelaksanaan Implementasi + Persentase Capaian Evaluasi dibagi 4 sehingga mendapatkan realisasi sebesar 100%.

Persentase OPD yang memiliki perencanaan baik diperoleh dari Jumlah kegiatan dalam renja PD/Jumlah kegiatan dalam renstra PD x 100% serta Total persentase penilaian PD/Jumlah PD sehingga mendapatkan realisasi sebesar 100%.

**3.1.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Adapun perbandingan capaian kinerja Tahun 2021 jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021
1.	Meningkatnya Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	95,03%	100%	-
2.	Terwujudnya Pemanfaatan Penelitian untuk Perencanaan Pembangunan	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan Inovasi Daerah	100%	100%	-
3.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan (IKP)	-	-	100%
		Persentase OPD yang memiliki perencanaan baik	-	-	100%

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, dapat diuraikan bahwa terjadi kenaikan nilai konsistensi dari tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu sebesar 44,97%. Hal ini menunjukkan bahwa Bappedalitbang Kota Palangka Raya bersama Perangkat Daerah berhasil melakukan fungsi koordinasi sebagai akibat penyesuaian tujuan, sasaran, program kerja beserta seluruh indikatornya selain adanya pemanfaatan sistem aplikasi perencanaan, sehingga tingkat konsistensi keselarasan mencapai 100%. Hal ini didukung dengan pemanfaatan aplikasi perencanaan yang berjalan secara optimal dan memberikan dampak baik bagi perencanaan pembangunan demi pencapaian sasaran daerah dan perwujudan visi misi Kepala Daerah, sehingga capaian kinerja Tahun 2020 termasuk kategori berhasil (sangat baik) perbandingannya sama dengan Tahun sebelumnya. Sedangkan keberhasilan capaian persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan Inovasi Daerah tetap konsistensi dengan capaian 100%.

Pada Tahun 2021 terjadi perubahan sasaran dan indikator sasaran yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023, dengan pencapaian realisasi 100%.



**3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Bappedalitbang Kota Palangka Raya**

Sebagai pembanding realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2020 dengan target jangka menengah yang tertuang di dalam Perubahan Renstra Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 sebagai berikut ini:

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Renstra Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Akhir RPJMD/ Renstra 2023	Realisasi 2021	Persentase Realisasi Terhadap Target RPJMD/Renstra
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan (IKP)	91,25%	82%	89,86%
		Persentase OPD yang memiliki perencanaan baik	89%	85%	95,50%

Dari tabel di atas sasaran meningkatnya kualitas perencanaan daerah dengan dua indikator untuk tahun ketiga RPJMD telah mencapai realisasi sesuai target yang direncanakan. Hal ini menjadi kesuksesan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya dalam melaksanakan fungsi koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

#### **3.1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)**

Dalam dokumen perencanaan Renstra, tetap berkaitan kepada program yang ada dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut Renstra Bappenas, merupakan dokumen perencanaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020-2024.

#### **3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Secara umum, capaian kinerja atas indikator sasaran sudah termasuk dalam kategori berhasil karena persentase capaian 100%. Tingkat keberhasilan yang cukup tinggi ini disebabkan optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya selaku unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan didukung pemanfaatan aplikasi perencanaan, aplikasi monitoring dan evaluasi. Namun demikian, berdasarkan hasil penilaian capaian kinerja Tahun 2021 ini, terdapat beberapa penyebab keberhasilan sehingga mencapai realisasi 100% berdasarkan data lampiran sebagai berikut:

- a. Optimalnya koordinasi oleh Perangkat Daerah dengan Bappedalitbang Kota Palangka Raya selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah;
- b. Optimalnya fungsi pengawasan dan pengendalian pada tahap perencanaan dan penganggaran;
- c. Adanya komitmen Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dimaksud sehingga mampu menetapkan prioritas program yang harus dilaksanakan;
- d. Optimalnya peran Bappedalitbang dalam melaksanakan koordinasi, monitoring/evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan;
- e. Optimalnya pemanfaatan sistem aplikasi perencanaan.

Terkait solusi yang dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melalui Bidang-Bidang sudah mengoptimalkan fungsi koordinasi, monitoring dan evaluasi ke Perangkat Daerah serta mengoptimalkan penggunaan aplikasi perencanaan maupun aplikasi monitoring evaluasi.

### 3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah ukuran keberhasilan penggunaan sumber daya dalam suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya maka proses dikatakan semakin efisien atau dengan kata lain dengan memanfaatkan sumber daya dengan lebih hemat/tidak boros namun menghasilkan sesuatu secara maksimal.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya dituntut untuk terus meningkatkan kinerja dalam perencanaan yang berkualitas, sehingga sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya. Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan anggaran, sumber daya manusia serta sarana yang dimiliki. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ Efisiensi Biaya} : 100\% - (\text{Realisasi Biaya} / \text{Target Biaya} \times 100\%)$$

Tahun 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya menyelenggarakan program untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan alokasi anggaran Rp. 14.701.208.599,- dengan realisasi sebesar 13.165.775.103,-. Berdasarkan rumus tersebut diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya sebesar 10,44%. Sehingga dapat diasumsikan tahun 2021 terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya.

Untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah, maka diperlukan sumber daya berupa :

- a. Sumber daya manusia yang kompeten
- b. Sumber dana yang mencukupi
- c. Sarana dan prasarana yang memadai

### 3.1.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berikut sasaran strategis, indikator kinerja, dan program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5**

**Matrik Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Program/Kegiatan  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2021**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
					Target	Capaian	%
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan (IKP)	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>100</b>
		Persentase OPD yang memiliki perencanaan baik	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	100
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Dok.)	4	4	100
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (Dok.)	1	1	100
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Pembayaran Gaji ASN dan Penyusunan Laporan Keuangan (Bulan)</b>	12	12	100
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN) (bulan)	12	12	100
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan (Bulan)	12	12	100

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan (Laporan)	3	3	100
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Disiplin Aparatur (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PNS) Beserta Atributnya (Orang)	78	78	100
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (Orang)	13	13	100
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pelayanan Administrasi Umum (Bulan)</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rekening yang terbayar (bulan)	12	12	100
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Dibeli dan Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dibeli (Persen)	100	100	100
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah SDM dan Alat Kebersihan yang terbayar (Bulan)	12	12	100
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis dan Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan (Bulan)	12	12	100
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Dibeli (Bulan)	12	12	100
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Kegiatan Kedinasan Lainnya yang Diadakan Diluar Daerah (Laporan)	120	120	100

			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum (Bulan)	12	12	100
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Distribusi Surat Menyurat (Surat)	335	335	100
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Setiap Bulan (Bulan)	12	12	100
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jenis dan Jumlah ATK yang Dibeli dan Jenis dan Jumlah Makanan dan Minuman yang Dibeli (Bulan)	12	12	100
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor (Bulan)	12	12	100
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang di pelihara (Unit)	12	12	100
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung kantor yang terpelihara, jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara (Bulan)	12	12	100
			<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang tersusun (Dokumen)	8	8	100
			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil analisis dan isu strategis pembangunan daerah (Dokumen)	1	1	100
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Laporan Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah (Dokumen)	1	1	100

			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun (Dokumen)	6	6	100
			<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Jumlah laporan analisis data dan informasi (laporan)	4	4	100
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi yang Diinput dalam Aplikasi E-Database dan SIPD dan Informasi Pembangunan yang Digunakan dalam Perencanaan Pembangunan (Laporan)	3	3	100
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Program yang Tersedia di Aplikasi Perencanaan (Laporan)	1	1	100
			<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan (Laporan)	11	11	100
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembanguna daerah (Laporan)	3	3	100
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan daerah (Laporan)	8	8	100
			<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	Jumlah koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (laporan)	6	6	100



			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (Laporan)	1	1	100
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah asistensi penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan (Laporan)	1	1	100
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan (Laporan)	1	1	100
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (Laporan)	1	1	100
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (Laporan)	2	2	100
			<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen bidang perekonomian dan bidang sumber daya alam (Dokumen)	18	18	100
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian (Dokumen)	5	5	100

			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian (Dokumen)	5	5	100
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian (Dokumen)	5	5	100
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang sumber daya alam (Dokumen)	1	1	100
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang sda (dokumen)	1	1	100
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang SDA (Dokumen)	1	1	100
			<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan (Dokumen)	15	15	100
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur (Dokumen)	2	2	100
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah asistensi penyusunan dokumen koordinasi perencanaan bidang infrastruktur (Dokumen)	2	2	100

			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur (Dokumen)	2	2	100
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang kewilayahan (Dokumen)	3	3	100
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang kewilayahan (Dokumen)	3	3	100
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang kewilayahan (Dokumen)	3	3	100
			<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan (Dokumen)	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>
			Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pariwisata (Dokumen)	1	1	100

			<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan (Dokumen)	<b>3</b>	<b>2,364</b>	<b>78,80</b>
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan (Dokumen)	3	2,364	78,80
			<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	Jumlah laporan hasil pengembangan inovasi dan teknologi	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100</b>
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah laporan hasil penelitian dan perekayasaan bidang teknologi dan inovasi (Laporan)	1	1	100
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif (Laporan)	1	1	100
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan (Laporan)	4	4	100

Dari matrik tersebut diatas menunjukkan bahwa semua program/kegiatan yang dilaksanakan, menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya.



## Dokumentasi Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Sasaran Kinerja Tahun 2021



Musrenbang Tingkat Kelurahan



Musrenbang Tingkat Kecamatan



Rapat RTL Skala Kawasan



Sosialisasi Usulan DAK Integrasi Tahun 2022



Focus Group Discussion Kelitbangan



Rapat Pengendalian dan Evaluasi

### 3.2. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator Kinerja sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selain faktor pendukung, aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator Kinerja dimaksud, hal ini karena operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung dengan pembiayaan yang memadai. Dari pagu anggaran sebesar **Rp. 14.701.208.599** realisasi sampai 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 13.165.775.103** atau 89,56% dengan rincian per program/kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.6**

**Matrik Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Sesuai Sasaran Strategis  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2021**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Keuangan		
					Jumlah Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan (IKP)	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)</b>	<b>84.168.001</b>	<b>84.063.150</b>	<b>99,88</b>
		Persentase OPD yang memiliki perencanaan baik	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah (Dokumen)	18.502.188	18.502.000	99,88
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Dok.)	44.802.376	44.698.000	99,77
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (Dok.)	20.863.437	20.863.150	99,99

			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Pembayaran Gaji ASN dan Penyusunan Laporan Keuangan (Bulan)</b>	<b>6.777.235.020</b>	<b>5.915.832.610</b>	<b>87,29</b>
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN) (bulan)	5.773.694.020	4.977.979.244	86,22
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan (Bulan)	983.166.000	917.478.366	93,32
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan (Laporan)	20.375.000	20.375.000	100
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Disiplin Aparatur (Persen)</b>	<b>118.420.000</b>	<b>105.474.000</b>	<b>89,07</b>
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PNS) Beserta Atributnya (Orang)	89.700.000	89.154.000	99,39
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (Orang)	28.720.000	16.320.00	56,82
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pelayanan Administrasi Umum (Bulan)</b>	<b>958.898.107</b>	<b>929.112.850</b>	<b>96,89</b>
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rekening yang terbayar (bulan)	17.376.875	17.239.000	99,21

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Dibeli dan Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dibeli (Persen)	337.800.938	320.951.898	95,01
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah SDM dan Alat Kebersihan yang terbayar (Bulan)	214.027.000	202.408.050	94,57
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis dan Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan (Bulan)	44.505.563	43.792.445	98,40
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Dibeli (Bulan)	9.000.000	8.657.000	96,19
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Kegiatan Kedinasan Lainnya yang Diadakan Diluar Daerah (Laporan)	336.187.731	336.064.457	99,96
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum (Bulan)	271.569.857	235.097.224	86,57
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Distribusi Surat Menyurat (Surat)	3.350.000	3.350.000	100
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Setiap Bulan (Bulan)	176.014.200	141.685.845	80,45
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jenis dan Jumlah ATK yang Dibeli dan Jenis dan Jumlah Makanan dan Minuman yang Dibeli (Bulan)	92.205.657	90.061.379	97,67



			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor (Bulan)	459.687.500	433.154.153	94,23
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang di pelihara (Unit)	168.427.600	144.786.315	85,96
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung kantor yang terpelihara, jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara (Bulan)	291.259.900	288.367.838	99,01
			<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang tersusun (Dokumen)	1.003.408.154	813.456.936	81,07
			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil analisis dan isu strategis pembangunan daerah (Dokumen)	415.253.250	279.968.601	67,42
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Laporan Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah (Dokumen)	123.400.750	115.572.285	93,66

			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun (Dokumen)	464.754.154	417.916.050	89,92
			<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Jumlah laporan analisis data dan informasi (laporan)	683.028.500	669.274.612	97,99
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi yang Diinput dalam Aplikasi E-Database dan SIPD dan Informasi Pembangunan yang Digunakan dalam Perencanaan Pembangunan (Laporan)	442.321.750	433.827.862	98,08
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Program yang Tersedia di Aplikasi Perencanaan (Laporan)	240.706.750	235.446.750	97,81
			<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan (Laporan)	608.751.761	606.220.450	99,58
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembanguna daerah (Laporan)	163.412.073	162.527.950	99,46

			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan daerah (Laporan)	445.339.688	443.692.500	99,63
			<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	Jumlah koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (laporan)	756.979.055	732.278.388	96,74
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (Laporan)	166.369.125	166.165.708	99,88
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah asistensi penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan (Laporan)	124.034.375	118.324.775	95,40
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan (Laporan)	299.609.375	281.049.776	93,81
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (Laporan)	95.000.000	94.816.250	99,81

			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (Laporan)	71.966.180	71.921.879	99,94
			<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen bidang perekonomian dan bidang sumber daya alam (Dokumen)	527.426.813	518.777.601	98,36
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian (Dokumen)	74.107.250	73.129.750	98,68
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian (Dokumen)	323.326.000	317.660.479	98,25
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian (Dokumen)	22.903.750	22.903.750	100

			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang sumber daya alam (Dokumen)	1	1	100
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang sda (dokumen)	1	1	100
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang SDA (Dokumen)	1	1	100
			<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan (Dokumen)	15	15	100
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur (Dokumen)	2	2	100
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah asistensi penyusunan dokumen koordinasi perencanaan bidang infrastruktur (Dokumen)	2	2	100

			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur (Dokumen)	2	2	100
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang kewilayahan (Dokumen)	3	3	100
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang kewilayahan (Dokumen)	3	3	100
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang kewilayahan (Dokumen)	3	3	100

			<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan (Dokumen)	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>
			Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pariwisata (Dokumen)	1	1	100
			<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan (Dokumen)	<b>3</b>	<b>2,364</b>	<b>78,80</b>
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan (Dokumen)	3	2,364	78,80
			<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	Jumlah laporan hasil pengembangan inovasi dan teknologi	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100</b>

			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah laporan hasil penelitian dan perekayasaan bidang teknologi dan inovasi (Laporan)	1	1	100
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif (Laporan)	1	1	100
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan (Laporan)	4	4	100



Pada Tahun Anggaran 2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya dialokasikan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 14.701.208.599 dengan realisasi Rp. 13.165.775.103 atau 89,56% yang dijabarkan ke dalam 4 Program dan 15 Kegiatan, adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai target Rp. 5.965.094.020 dengan realisasi sebesar Rp. 5.167.259.244 atau 86,62%.
2. Belanja Barang dan Jasa target Rp. 8.269.498.328 dengan realisasi sebesar Rp. 7.544.104.411 atau 91,35%.
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 457.616.251 dengan realisasi sebesar Rp. 435.718.488 atau 95,21%.
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 9.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 8.657.000 atau 96,19%.

Penyelenggaraan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya merupakan tahapan dari Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Keberhasilan yang dicapai adalah berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2021 Berdasarkan hasil analisis realisasi kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Perencanaan realisasi sebesar 100%.
2. Persentase OPD yang memiliki perencanaan baik realisasi sebesar 100%.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya sangat bergantung atas optimalnya dalam menjalankan fungsi koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta ditunjang dengan penggunaan aplikasi secara efektif. Untuk itu dibutuhkan komitmen tinggi serta kerjasama dari semua pihak demi terwujudnya tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja.
2. Mengoptimalkan kebutuhan anggaran dan memantapkan perencanaan kebutuhan anggaran agar terdapat keseimbangan antara perencanaan dan realisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2021 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Palangka Raya, Januari 2022

Kepala Bappedalitbang Kota Palangka Raya,



**Ir. HARRY MAIHADI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630504 199303 1 020